



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL MUN'IM WASI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **140766**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **811.000.000**

1. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV 2015 JEEP Tahun 2015, LAINNYA Rp. 300.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS 2017 MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **12.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **70.650.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.693.650.000**

III. HUTANG Rp. **200.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.493.650.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.